

SINERGITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN PECALANG DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

I Dewa Gede Widya Merta
NPP. 32.0592

Asdaf Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: dodewidya2602@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP)) The 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) mark the largest in history, posing a significant challenge to maintaining security and public order across various regions, including Bangli Regency, Bali Province, which has experienced an increase in voter numbers, leading to a higher vulnerability index. **Purpose:** This study aims to analyze the synergy between the Civil Protection Unit (Satlinmas) and the traditional Balinese security force (Pecalang) in maintaining public order during the 2024 Pilkada in Bangli Regency, identify inhibiting factors, and explore strategic efforts to strengthen collaboration between the two entities. **Method:** Utilizing a qualitative descriptive method with an inductive approach based on Sugiyono's methodology, data were collected through interviews and documentation, and analyzed using data reduction, information presentation, and conclusion drawing techniques. **Result:** The findings indicate that the synergy between Satlinmas and Pecalang has been established through coordination of security activities and information exchange; however, obstacles remain, including unclear role definitions, limited resources, and institutional egocentrism. **Conclusion:** The collaboration between Satlinmas and Pecalang has been effective, reflecting cooperation between local and national security forces. To achieve optimal synergy, it is recommended to implement continuous training, improve inter-agency communication, strengthen the *Sipandu Beradat* forum, and enhance institutional capacity to ensure safe and orderly elections. **Keywords:** Synergy, Satlinmas, Pecalang.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah dimana ini menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang mengalami peningkatan jumlah pemilih sehingga berakibat pada meningkatnya indeks kerawanan Pilkada. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli, mengidentifikasi faktor penghambat, serta mengkaji upaya strategis yang dilakukan dalam memperkuat kolaborasi kedua pihak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif menurut Sugiyono. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh

penulis dalam penelitian ini yaitu sinergitas antara Satlinmas dan Pecalang di Kabupaten Bangli telah terjalin melalui koordinasi kegiatan pengamanan dan pertukaran informasi, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya kejelasan peran, keterbatasan sumber daya, dan ego sektoral antar lembaga. **Kesimpulan:** Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pecalang sudah berjalan dengan baik dengan terjadinya kerjasama antara Satuan Pengamanan Lokal dan Satuan Pengamanan Nasional. Untuk menciptakan sinergitas yang optimal disarankan melaksanakan pembinaan berkelanjutan, peningkatan komunikasi lintas lembaga, serta penguatan peran forum Sipandu Beradat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan Pilkada yang aman dan tertib.

Kata Kunci: Sinergitas, Satlinmas, Pecalang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 menjadi ajang politik terbesar dalam sejarah Indonesia, karena melibatkan 37 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 508 kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota. Dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2020 yang hanya melibatkan 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota, skala tahun 2024 jauh lebih besar Nivada, (2024), sehingga meningkatkan kompleksitas dan risiko pelaksanaan, terutama dalam aspek keamanan dan ketertiban umum. Provinsi Bali, yang dikenal dengan sistem adat dan tradisinya yang kuat, termasuk dalam daerah yang memiliki kerawanan sedang berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, dengan skor 45,44. Kabupaten Bangli sebagai salah satu daerah di Bali menunjukkan potensi kerawanan lebih tinggi seiring dengan peningkatan jumlah pemilih, dari 187.372 pada tahun 2020 menjadi 196.428 pada tahun 2024.

Data dari Bawaslu Kabupaten Bangli menunjukkan bahwa pada Pilkada tahun 2020 telah terjadi 37 kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum, seperti kerusuhan massa, penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, kampanye hitam, serta gangguan lalu lintas Saifullah, (2024). Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara indeks kerawanan dan gangguan nyata yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi hal yang sangat penting Sutiyo & Eva, (2023), terlebih dengan potensi tantangan seperti netralitas ASN, konflik kepentingan dari calon petahana, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat memperburuk situasi politik. Laporan dari Kompolnas (2023) juga menyoroti bahwa kurangnya sinergitas antar satuan pengamanan, baik di tingkat nasional maupun lokal, menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko konflik dalam pelaksanaan Pilkada.

Di tengah tantangan tersebut, penting untuk memperkuat sinergi antara satuan pengamanan formal dan berbasis adat di daerah, seperti Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang. Satlinmas memiliki dasar hukum dari Permendagri No. 26 Tahun 2020 Bhaskara et al., (2024), sementara Pecalang diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 sebagai satuan pengamanan tradisional yang berfungsi menjaga keamanan di wilayah adat I Made Wisnubawa Adiwijana, (2011). Di Kabupaten Bangli, sinergitas ini diperkuat dengan pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 300.05/166/2024 serta pelaksanaan sistem keamanan terpadu melalui program Sipandu Beradat. Dengan total 3.279 personel Pecalang dan 2.332 personel Satlinmas, diharapkan kerja sama ini mampu menjaga stabilitas dan

keamanan selama Pilkada 2024. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *“Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pecalang Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli Provinsi Bali.”*

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara masih ditemukan beberapa hambatan dalam Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pecalang Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli terbagi menjadi 2 indikator yakni faktor budaya dan faktor institusi. Perbedaan dalam aspek budaya serta struktur komando antara kedua institusi berkontribusi terhadap perbedaan pola kerja, tingkat kedisiplinan, serta efektivitas dalam menjalankan tugas pengamanan. Dalam konteks ini, kurangnya disiplin operasional yang ditunjukkan oleh beberapa anggota di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi koordinasi yang optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penulisan yang dilakukan oleh Pramono et al., (2019) dengan judul Sinergitas Antar Stakeholder dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sinergitas yang terjalin antar stakeholder dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta serta bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses sinergitas tersebut, serta mengkaji upaya strategis yang dilakukan oleh para stakeholder guna meningkatkan efektivitas kerja sama dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut bahwa sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Gilingan telah terjalin melalui pola komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang cukup baik antara pihak kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Bentuk sinergitas tersebut terlihat dalam kegiatan patroli bersama, forum komunikasi masyarakat, serta penyelesaian konflik sosial secara musyawarah.

Penulisan selanjutnya yang dilakukan Komang Ngurah, (2024) dengan judul Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Hasil dari penulisan tersebut adalah kolaborasi antara Satlinmas dan Pecalang dalam pelaksanaan SIPANDU BERADAT di Kecamatan Bebandem telah terjalin secara aktif melalui pembagian peran, koordinasi kegiatan pengamanan, dan pelibatan dalam upacara keagamaan serta kegiatan sosial masyarakat. Kolaborasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan berbasis adat.

Penulisan oleh Zulkifli, (2021) dengan judul Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek penertiban alat peraga kampanye dan penanganan pelanggaran ketertiban umum selama masa kampanye. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui koordinasi lapangan, pembagian tugas yang jelas, dan pelaksanaan patroli bersama.

Penelitian oleh Melly, (2021) dengan judul Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk sinergitas antara Desa Dinas dan Desa Adat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan juga bertujuan untuk mengidentifikasi peran masing-masing institusi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, serta menelaah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Desa Dinas dan Desa Adat di Desa Tibubeneng terwujud melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi rutin, dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti pendataan warga, sosialisasi protokol kesehatan, serta pelaksanaan karantina dan pembatasan mobilitas. Kedua lembaga berperan aktif sesuai dengan fungsinya masing-masing, di mana Desa Dinas lebih fokus pada administrasi pemerintahan dan penyaluran bantuan sosial, sedangkan Desa Adat melalui Pecalang berperan dalam pengawasan dan pengamanan wilayah adat.

Penelitian oleh Hilham, (2024) dengan judul Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan selama tahapan Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas bersama, serta mengevaluasi efektivitas kerja sama antarinstansi dalam menciptakan ketertiban umum dan netralitas selama masa kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berjalan dalam bentuk kerja sama operasional, koordinasi teknis lapangan, dan pelaksanaan kegiatan penertiban APK secara bersama-sama, kolaborasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kampanye dan menjaga estetika serta ketertiban lingkungan selama tahapan pemilu berlangsung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam karya ilmiah, penulis berfokus mengenai bagaimana sinergitas yang terjalin antara satuan keamanan lokal dengan satuan keamanan nasional yaitu sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang di Kabupaten Bangli dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban umum Pilkada Serentak 2024 yang merupakan Pilkada terbesar dalam Sejarah yang berakibat pada meningkatnya indeks kerawanan pilkada secara nasional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus penulisan yang disajikan penulis

sangat berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Memadukan dimensi dari teori(Najiyati & Rahmat, 2011), yaitu dengan Komunikasi dan Koordinasi sebagai dimensinya, dipadukan teori komunikasi oleh (Hani Handoko, 2010) sebagai indikator komunikasi, serta teori koordinasi dari Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, (2011:86) sebagai indikator dari koordinasi itu sendiri.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Pecalang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

II. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan desain penulisan kualitatif(Sugiyono, 2021). Penulisan kualitatif deskriptif memungkinkan penulis untuk berpartisipasi langsung dalam peristiwa penulisan, menganalisis, mengamati, mencatat, dan mendeskripsikan permasalahan terkait sinergitas yang terjalin dan sesuai dengan kondisi nyata dan alami di lapangan (Fernandes, 2016). Kemudian menarik kesimpulan dengan cara mengumpulkan permasalahan tertentu berupa data lapangan, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari permasalahan yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2018). Melalui model penulisan ini, penulis dapat memberikan gambaran rinci berdasarkan kejadian dan data langsung di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Creswell, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pecalang Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis, dikemukakan bahwa Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Pilkada Serentak di Kabupaten Bangli Provinsi Bali dapat terlaksana melalui program Sipandu Beradat dimana Program Sipandu Beradat yang dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang memberikan sebuah sinergi dalam melakukan Kerjasama, koordinasi, dan komunikasi. Dapat dilihat dari adanya penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangli yang berdampak positif bagi pemerintah serta dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat di Kabupaten Bangli.

Sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Pecalang dalam program Sipandu Beradat merupakan wujud kolaborasi strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah desa adat, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli. Program ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur Bali No. 26 Tahun 2020. Dalam menghadapi

meningkatnya indeks kerawanan akibat bertambahnya jumlah pemilih, sinergi antara Satlinmas dan Pecalang terbukti efektif melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dalam menjalankan tugas pengamanan di tingkat desa adat. Sinergitas ini tidak hanya membantu menekan potensi gangguan ketertiban umum dan tindak pidana, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendukung Bhabinkamtibmas serta menciptakan suasana kondusif selama tahapan Pilkada.

Berdasarkan teori sinergitas Najiati dan Rahmat (2011), keberhasilan kolaborasi ini tercermin dari indikator koordinasi dan komunikasi yang berjalan baik di lapangan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial-politik di Kabupaten Bangli. Dimensi komunikasi memiliki peran krusial dalam menciptakan dan memperkuat sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011), yakni pemahaman, kejelasan, dan kepuasan, komunikasi menjadi pondasi utama yang memastikan kerja sama antar unsur keamanan ini berjalan harmonis dan efektif. Pemahaman dibentuk melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan secara rutin dan merata di setiap kecamatan oleh Forum Sipandu Beradat, sebagai wadah koordinasi antara unsur pemerintah dan desa adat. Kegiatan ini berhasil menyamakan persepsi antara Satlinmas yang berbasis regulasi negara dengan Pecalang yang berlandaskan pada kearifan lokal (awig-awig), sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan tugas. Kejelasan komunikasi tampak dari adanya batas kewenangan yang tegas namun tetap terkoordinasi, di mana Satlinmas berada di bawah komando Satpol PP dan Pecalang dikendalikan oleh Majelis Desa Adat. Meski tidak dalam garis komando yang sama, komunikasi dua arah tetap berjalan secara efektif melalui forum-forum bersama yang terstruktur. Selanjutnya, indikator kepuasan tercermin dari respons aparat dan masyarakat yang merasa tenang, aman, serta percaya terhadap kesiapan dan kesigapan aparat keamanan dalam menghadapi potensi kerawanan selama Pilkada. Bahkan masyarakat menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun ini terasa lebih kondusif berkat keterlibatan aktif dan sinergis antara Satlinmas dan Pecalang. Dengan demikian, dimensi komunikasi yang dijalankan secara sistematis dan berbasis saling pengertian telah menjadi motor penggerak utama dalam membangun sinergi yang kuat, efisien, dan berkelanjutan antar unsur keamanan lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Bangli.

Koordinasi memegang peranan penting dalam menciptakan sinergitas yang efektif antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Berdasarkan kerangka teori koordinasi menurut Hani Handoko (2010), terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan koordinasi, yaitu kesatuan tindakan, kejelasan tujuan, pembagian kerja, dan disiplin. Keempat indikator ini terbukti sangat berpengaruh dalam memperkuat sinergi kedua unsur pengamanan tersebut. Dalam hal **kesatuan tindakan**, koordinasi antara Satlinmas yang berbasis hukum positif dan Pecalang yang mengedepankan pendekatan adat menciptakan satu persepsi dan aksi yang saling melengkapi, seperti terlihat dalam pelaksanaan patroli bersama dan pembagian sif pengamanan di TPS. Sementara itu, **kejelasan tujuan** menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat arah kerja, yang dibuktikan dengan penyusunan SOP, pelatihan

bersama, dan forum koordinasi rutin melalui Forum Sipandu Beradat. Kemudian, **pembagian kerja** yang terstruktur dan berdasarkan regulasi daerah, seperti Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020, menjamin setiap aktor memahami batasan serta tanggung jawabnya—Pecalang mengawal aspek adat dan budaya, sedangkan Satlinmas fokus pada keamanan umum dan regulatif. **Disiplin**, sebagai indikator terakhir, menjadi fondasi moral dan operasional dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas sinergi, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai kedisiplinan sebagian anggota Satlinmas. Namun, mekanisme evaluasi rutin dan pengawasan melalui Forum Sipandu Beradat memungkinkan permasalahan ini untuk diidentifikasi dan diperbaiki secara sistematis dengan sinergitas menciptakan kinerja yang tinggi Cabrilo, Dahms, dan Tsai (2024). Dengan terpenuhinya empat indikator koordinasi tersebut, sinergitas antara Satlinmas dan Pecalang dapat dikatakan berjalan optimal dan mampu menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli, meskipun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek kedisiplinan dan pelayanan di tingkat lapangan.

Faktor penghambat dalam sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni faktor budaya dan faktor institusional. Perbedaan mendasar antara kedua satuan ini terlihat dari pendekatan mereka dalam menjalankan tugas: Satlinmas sebagai bagian dari struktur pemerintahan mengutamakan pendekatan berbasis hukum formal dan prosedur birokratis (Kurhayadi, 2024), sedangkan Pecalang beroperasi berdasarkan kearifan lokal, adat istiadat, serta struktur sosial tradisional desa adat. Perbedaan ini kerap kali menimbulkan kesenjangan dalam persepsi terhadap tugas dan tanggung jawab, sehingga mempengaruhi koordinasi di lapangan, memperlambat pengambilan keputusan, dan bahkan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan perintah. Ketidaksamaan dalam struktur komando, tingkat kedisiplinan, serta pola komunikasi juga berkontribusi terhadap kurang optimalnya implementasi tugas bersama, khususnya dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi seperti pada masa Pilkada. Namun demikian, berbagai upaya strategis telah dirancang dan mulai dijalankan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja bersama Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli selaku pembina Forum Sipandu Beradat telah menggagas langkah-langkah konkret, seperti pembentukan forum kolaborasi antar wilayah kecamatan sebagai ruang diskusi dan pengambilan kebijakan bersama, pelaksanaan pelatihan dan workshop lintas lembaga yang bertujuan memperkuat pemahaman terhadap peran masing-masing serta membangun kepercayaan dan komunikasi yang sinergis. Selain itu, disusun pula protokol kolaborasi yang memuat prosedur operasional standar untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memperjelas mekanisme kerja sama di lapangan. Tidak kalah penting, dilakukan pula sosialisasi dan kampanye publik untuk memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Kurniasih, Madjid, dan Hilman (2024), sekaligus menanamkan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara Satlinmas dan Pecalang dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di masa krusial seperti Pilkada. Berbagai langkah ini terbukti sangat berpengaruh dalam menciptakan pola kerja yang harmonis dan efektif, serta menjadi solusi fundamental untuk mewujudkan sinergitas yang optimal, adaptif, dan berkelanjutan antara Satlinmas dan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pilkada serentak di Kabupaten Bangli.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Sinergitas yang terjalin antara Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bangli diselenggarakan melalui Forum Sipandu Beradat yang dimana mengintegrasikan seluruh komponen keamanan baik keamanan nasional hingga satuan keamanan lokal. Temuan ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dengan membandingkannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya guna melihat relevansi, kesamaan, maupun perbedaannya. Sama halnya dengan temuan penelitian Joko Pramono, Wulan Kinasih (2019) “Sinergitas Antar Stakeholder dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”. sinergitas Satlinmas dan Pecalang di Kabupaten Bangli juga sama-sama menekankan pentingnya kerja sama antar pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keduanya menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi efektif sangat krusial. Namun, perbedaannya terletak pada konteks: penelitian di Surakarta berfokus pada sinergi antar stakeholder formal dalam lingkungan perkotaan, sedangkan penelitian di Bangli mengkaji sinergi antara institusi formal dan adat, dengan tantangan utama pada perbedaan budaya dan sistem komando. Upaya di Bangli lebih menekankan integrasi nilai hukum dan adat melalui forum kolaborasi dan pelatihan bersama.

Sedangkan penelitian dari I Komang Ngurah Yuda Pratama (2024) dengan judul “Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali” menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat dipengaruhi oleh faktor yakni aspek lingkungan kolaborasi, keanggotaan kolaborasi, proses/struktur kolaborasi, komunikasi dalam kolaborasi, tujuan kolaborasi, dan sumber daya kolaborasi. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti kolaborasi antara satuan perlindungan masyarakat dan pecalang dalam menjaga ketertiban di Bali. Bedanya, penelitian sebelumnya membahas sistem pengamanan berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem, sedangkan penelitian ini fokus pada pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ni Made Melly Deni Kiara Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani (2021) dengan judul “Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung”, yang menyatakan bahwa keberhasilan sinergitas dapat dicapai melalui kolaborasi antara satuan keamanan lokal dengan satuan keamanan nasional sehingga menciptakan suatu system keamanan yang kuat dan optimal.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam konteks sinergitas antara satuan perlindungan nasional dipadukan dengan satuan keamanan lokal dalam hal ini Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pecalang dapat menciptakan situasi yang aman pada saat Pilkada Serentak. Penelitian oleh Zulkifli (2022), dengan judul “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara”. Menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan sinergi yang baik dalam pelaksanaan Pilkada. Namun, masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya perlengkapan yang dimiliki oleh petugas pengaman lapangan

seperti Linmas, serta akses yang sulit menuju lokasi pemilihan akibat minimnya fasilitas yang ada. Persamaan lainnya terdapat pada penelitian Habib Hilham Saputra (2024) dengan judul “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Rejang Lebong belum optimal. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti sinergitas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat daerah. Namun, penelitian sebelumnya fokus pada kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban alat peraga kampanye

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan di lapangan, penulis menemukan bahwa sinergitas antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pecalang dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum selama Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli berlangsung cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya pola komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik, meskipun bersifat dinamis. Keduanya menjalankan peran yang saling melengkapi: Satlinmas hadir sebagai unsur keamanan formal yang berbasis pada regulasi nasional, sementara Pecalang menjalankan fungsi pengamanan berbasis adat yang lebih diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Kehadiran kedua elemen ini menciptakan pengamanan dua lapis, yang terbukti membantu menjaga stabilitas selama proses demokrasi berlangsung di wilayah adat maupun administratif.

Namun demikian, efektivitas sinergitas tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan, khususnya yang berkaitan dengan faktor budaya dan institusional. Perbedaan garis komando menjadi salah satu kendala utama, di mana Satlinmas tunduk pada struktur formal pemerintahan yang kaku dan hirarkis, sementara Pecalang mengikuti sistem nilai dan komando adat yang lebih fleksibel. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pihak juga sering kali tidak sejalan; Satlinmas lebih menekankan pendekatan legalistik, sementara Pecalang menggunakan pendekatan sosial dan persuasif berbasis nilai lokal. Ketidakharmonisan ini terkadang menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar keduanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah inisiatif dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sebagai pembina program Sipandu Beradat. Upaya tersebut meliputi pembentukan forum kolaborasi antar Satlinmas dan Pecalang di tingkat kecamatan dan desa adat, penyelenggaraan pelatihan dan workshop bersama guna membangun pemahaman bersama, penyusunan protokol kerja yang terstandarisasi, serta sosialisasi dan kampanye publik untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sinergi ini. Keempat langkah ini dianggap sangat penting dalam memperkuat kerja sama lintas budaya dan kelembagaan, serta membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai antar anggota. Dengan demikian, sinergitas yang lebih solid dan terpadu dapat terwujud dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya selama momentum penting seperti Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan kemampuan pengetahuan terkait dengan hal teknis yang menjadi dasar Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pecalang Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli Provinsi Bali yang menjadi fokus utama penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Sinergitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dengan Pecalang Dalam Menjaga Ketentraman dan Ktertiban Umum Pilkada Serentak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli serta Kepala Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskara, G. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowering Community Protection Units (SATLINMAS) for Ensuring Security, Peace, and Order. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24. doi: 10.21070/ijppr.v24i0.1341
- Creswell, J. W., & C. D. (2018). *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). California: SAGE Publications.
- Fernandes, S. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. In Alfabeta.
- Hani Handoko, T. (2010). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hilham, H. (2024). *SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU*.
- I Made Wisnubawa Adiwijana. (2011). Fungsi Dan Tugas Pecalang (Studi Deskriptif Kualitatif Di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali). *UNS*.
- Kurhayadi. (2024). Enhancing public safety and order: Assessing the role of SATLINMAS in Bandung. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7). doi: 10.24294/jipd.v8i7.4995
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Melly, M. (2021). Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 3.
- Najiyati & Rahmat. (2011). SINERGITAS INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI. *Jurnal Ketransmigrasian*, 28, 120–122.

- Ngurah, K. (2024). *KOLABORASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN PACALANG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT DI KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI*.
- Nivada. (2024). PEMETAAN RESIKO POLITIK DAN KEAMANAN PEMILU 2024. *JURNAL TRIAS POLITIKA: MEKANISME KEWASPADAAN DINI DAN IMPLIKASINYA*.
- Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN KAMTIBMAS DI KELURAHAN GILINGAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA. *Universitas Slamet Riyadi*, 3.
- Saifullah. (2024). *Bawaslu Bali Petakan Kerawanan Pilkada 2024 Sumber Artikel berjudul "Bawaslu Bali Petakan Kerawanan Pilkada 2024, Apa Saja?"*, selengkapnya dengan link: <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/bali-nusra/pr-888366308/bawaslu-bali-petakan-kerawanan-pilkada-2024-apa-saja?page=all&form=MG0AV3> Baca berita lebih nyaman dan kekinian, yuk download aplikasi Pikiran Rakyat Mobile: - Android: bit.ly/PikiranRakyatMobile - iOS: apple.co/3Wcr42n. IndoBaliNews.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sutiyo & Eva. (2023). *Perlindungan Masyarakat*.
- Zulkifli. (2021). *SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAN PILKADA TAHUN 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA*.

